

# SURVAI PENGEMBANGAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING (BK) DI SEKOLAH

**Atrup**

Prodi BK-FKIP UNP Kediri

[atrupdr@yahoo.com](mailto:atrupdr@yahoo.com)

## ABSTRACT

*Paradigm shift in guidance and counseling (G&C) should be understood and implemented in development and programming G&C at school. But in reality, not all of the teachers understand and implement it. This study aimed to describe the types of development and forming models (patterns), also the reasons why G&C teachers (school counselor) choose the model. This was the survey research, the data obtained through document reports by students that surveyed on the implementation of the school counseling program. There were 22 reports which analyzed and the results were summarized as follows: (1) Many of G&C teachers developed and programmed G&C based on the pattern of 17 and 17+ (86.36%) and only slightly (13.63%) was based on Kerangka Kerja Utuh (KKU), (2) The reasons of using the pattern of 17 and 17+ was because they do not understand the concept, procedures and implementation of KKU models. It means they do not follow G&C paradigm well.*

**Keywords:** *Survey, Development, Guidance and Counseling Program*

## PENDAHULUAN

Sejak kehadiran Bimbingan dan Konseling (BK) di Indonesia tahun 1950-an yang selanjutnya diadakan konferensi FKIP seluruh Indonesia di IKIP Malang sekitar tahun 1960, hingga saat ini mengalami penyempurnaan baik dari segi paradigma, konseptual-teoretik, model pengembangan maupun praksis BK di sekolah. Sudrajat (2008: 1) menyatakan saat ini terjadi 'Rekonseptualisasi bimbingan dan konseling'. Pergeseran paradigma dari BK konvensional tahun 1950-an yang menekankan semata-mata pada penanganan masalah peserta didik, kedua munculnya konsepsi BK-Perkembangan tahun 1990-an dan pengembangan diri yang dijalankan melalui kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan bimbingan konseling antara tahun 2004 dan 2006 (Baca: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, 2004; Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, 2006; Sosialisasi Mendiknas tentang KTSP, 2007). Saat ini dikembangkan konsepsi BK-Komprehensif (Comprehensive Guidance and Counseling) yang berusaha menjangkau secara utuh aspek-aspek perkembangan peserta didik dan sarana pendukung lainnya.

Dalam implementasinya BK di sekolah sering terjadi *miss-conseption*. Suatu saat, penulis menemukan salah seorang kepala sekolah mengalihkan tugas guru BK menjadi pembina ekstra kurikuler. Ia beranggapan bahwa praktik pengembangan diri mengalihkan fungsi guru BK menjadi pembina ekstra kurikuler. Kenyataan semacam itu menunjukkan

perlunya sosialisasi dan pemasyarakatan kepada semua pihak (Stakeholder) terutama dari para elit pengambil kebijakan, bila terjadi pergeseran konsepsi dan praksis BK. Memang tidak salah, bila program dikaitkan dengan kegiatan ekstra kurikuler karena keberadaan BK bersifat *psycho-education* artinya mereka bekerja di lembaga pendidikan terutama bersentuhan dengan aspek psikis seperti pengembangan potensi, pemenuhan bakat-minat, pembentukan kepribadian, pemilihan karir, pemotivasian dan sejenisnya. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekstra kurikuler bukan berarti tugas guru BK dialihkan menjadi pembina ekstra kurikuler, akan tetapi mereka turut bertanggung jawab atas ketersediaan, pemilihan dan keberhasilan peserta didik dalam menentukan kegiatan ekstra kurikuler di sekolahnya.

Dalam pengembangan ilmu-ilmu terapan seperti halnya BK kadang dipersepsikan beda dari syarat formalnya. Sebagai contoh, kehadiran BK di Indonesia pada awalnya menekankan semata-mata pada pengentasan masalah peserta didik dan tidak ada kaitannya dengan aspek kemiskinan. Ini berbeda dengan niat awal BK di Malaysia, meskipun semula sama-sama mendasarkan pada model ASCA (America School Counselor Assosiation) sekitar tahun 1963 (Rahman, 2012) yang menekankan pada pengentasan masalah peserta didik dan kemiskinan.

Upaya menangani kemiskinan juga menjadi prioritas BK di Malaysia pada waktu itu, sehingga perihal kemiskinan menjadi garapan banyak pihak termasuk guru BK. Awal tahun 2012 terjadi reorientasi BK di Malaysia, ia menekankan pada pengembangan kepribadian dan disiplin peserta didik "The service provided was reengineered to focus on students' personality development and discipline. These efforts are aimed at developing students who are knowledgeable, skilled, humane in nature and with a sense of moral vales" (Rahman, 2012: 4). Itu artinya, sejak awal kemiskinan sudah menjadi bahan kajian BK berbeda dengan praxis BK di Indonesia, wilayah garapan guru BK sepertinya tidak bersentuhan dengan kemiskinan. Bila seorang guru BK menangani peserta didik yang mengeluh karena tidak dapat membayar uang sekolah, konselornya mengatakan "Maaf ya, itu di luar tugas saya".

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa perkembangan konsepsi BK dalam kurun waktu tertentu memberikan penekanan secara sigmentari pada bagian-bagian seperti semata-mata fokus pada masalah peserta didik. Periode kedua dikaitkan antara pengentasan masalah dengan pencapaian tugas perkembangan dan pengembangan diri peserta didik. Sedangkan perkembangan berikutnya, mengorientasikan pada kemungkinan seluruh bagian yang menjadi garapan guru BK yang dikemas dalam konsepsi BK-Komprehensif. Pembicaraan perlunya mengembangkan konsepsi BK-Komprehensif di Amerika dimulai sejak tahun 1988 (Baca: Research and Counseling: Building Strong School Counseling Programs oleh Henderson, 2004). Selanjutnya, ASCA berusaha mendefinisikan ulang dan mengembangkan makna program BK-komprehensif tersebut "In 1988, 1993 and 1997, ASCA developed and refined its position statements on comprehensive programs and the

professional school counselor and comprehensive school counseling programs” (Henderson, 2004: 66).

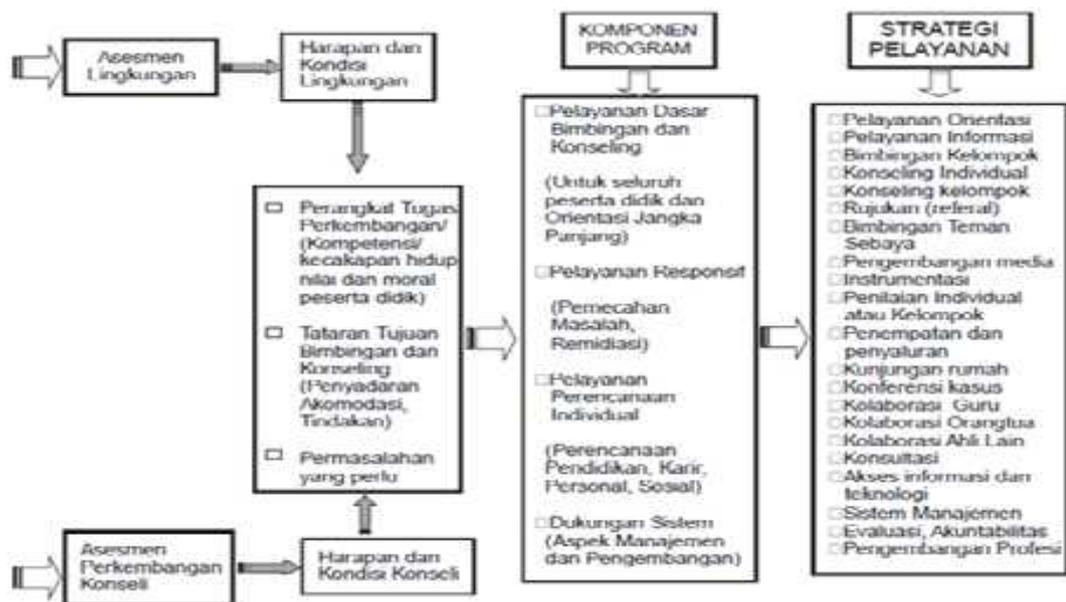
Di Indonesia, upaya mengembangkan BK-Komprehensif secara konseptual dimulai sejak tahun 2007 yaitu dengan diterbitkan ‘Blue Book’: Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal oleh Dirjen. PMPTK (2007). Hasil kerja dalam kurun waktu yang panjang dari Kartadinata (2011) yang pada waktu itu sebagai Ketua Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Meskipun dalam perkembangannya terdapat perbedaan orientasi antara ASCA (ASCA, 2004; Henderson, 2004) dan Indonesia (Dirjen. PMPTK, 2007) tentang konsepsi dan implementasi BK-Komprehensif. BK-Komprehensif diartikan sebagai program bimbingan dan konseling di sekolah yang berorientasi pada pengentasan masalah, pencapaian perangkat tugas perkembangan dan pengembangan diri, pencapaian tataran tujuan BK yang dikemas dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik (SKKPD) dan pengembangan potensi peserta didik.

Konsepsi BK-Komprehensif, selanjutnya dimodelkan dalam pengembangan dan penyusunan program BK di sekolah yang dikenal dengan Kerangka Kerja Utuh/KKU (Dirjen. PMPTK., 2007; Yusuf, 2011). Ungkapan perlunya reorientasi konseptual BK disampaikan Sunaryo yang dikutip oleh Sudrajat (2008: 1) “Dalam satu tahun terakhir ini, ABKIN telah bekerja secara intensif untuk mencari formulasi terbaik tentang bagaimana seharusnya penyelenggaraan BK di sekolah, yang dalam KTSP belum terakomodir dengan baik”. Diharapkan model KKU telah dapat diimplementasikan secara masif oleh guru BK di sekolah, karena model tersebut merupakan hasil kajian dan pengembangan keilmuan BK di Indonesia. Namun diduga dalam mengimplementasikan masih mengalami beberapa kendala, di antaranya kurangnya sosialisasi, kemampuan guru BK dalam memahami konsepsi KKU, sikap dan kebiasaan menunggu dan kurang berkreasi, pimpinan sekolah kurang mendorong munculnya inisiasi dari guru, dan sejenisnya. Mereka masih merasa ‘nyaman’ dengan model pengembangan dan penyusunan program yang selama ini dilakukan, yaitu mendasarkan pada pola 17, 17+ dan IKMS (Identifikasi Kebutuhan Masalah Siswa).

KKU merupakan penyempurnaan dari pola 17 dan 17+ adalah kerangka model BK-Komprehensif yang diartikan sebagai salah satu model pengembangan dan penyusunan program BK di sekolah yang dimulai dari kegiatan asesmen yang meliputi asesmen lingkungan dan asesmen perkembangan konseli dengan menggunakan instrumen asesmen yang dapat dipertanggung jawabkan seperti observasi, interview, angket, dokumentasi, alat ungkap masalah (AUM), daftar inventory, dokumentasi, dan sejenisnya. Berdasarkan hasil asesmen selanjutnya diintegrasikan ke dalam harapan lingkungan dan harapan konseli dengan mempertimbangkan perangkat tugas-tugas perkembangan, tataran tujuan BK dan pengentasan masalah. Proses pengintegrasian inilah yang disebut *Needs Assessment Analysis*, yaitu menganalisis jenis-jenis kebutuhan layanan yang akan diprogram.

Berdasarkan deskripsi jenis-jenis layanan tersebut, selanjutnya diklasifikasikan ke dalam komponen-komponen program BK yang meliputi layanan dasar, layanan responsive, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem dengan menggunakan strategi layanan yang sesuai. Strategi layanan dapat dipilih di antara 23 (dua puluh tiga) jenis layanan. Dalam implementasinya, KKU terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu: (1) langkah pertama melakukan kegiatan *assessment*, (2) langkah kedua melakukan kegiatan *needs assessment analysis*, (3) langkah ketiga mengklasifikasikan ke dalam komponen-komponen program BK, dan (4) langkah keempat memilih dan menetapkan strategi layanan BK yang sesuai. Lebih jelas dapat diperiksa pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1: Model Kerangka Kerja Utuh BK (Dirjen. PMPTK., 2007: 35)



## METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan survai yang melibatkan variabel tunggal yaitu pengembangan dan penyusunan program BK di sekolah. Fokus penelitian pada dasar dan alasan guru BK dalam pemilihan dan penetapan model pengembangan dan penyusunan program BK di sekolah. Ada 22 (dua puluh dua) laporan yang dianalisis berasal dari dokumen laporan hasil survai mahasiswa yang tersebar di jajaran Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Trenggalek dan Kabupaten Nganjuk. Yang terdiri dari 8 satuan pendidikan SMP, 8 Mts, 11 SMA, dan 1 SMK lebih rinci lokasi penelitian dapat diperiksa pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1: Sebaran Lokasi Penelitian

Lembaga Sekolah	Jumlah	%
SMP	8	36,36%

MTs	2	9,09%
SMA	11	50%
SMK	1	4,55%
Jumlah	22	100%

Penelitian dilaksanakan selama semester gasal tahun 2012/2013 yang berlangsung dari Bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013. Subyek penelitian berupa laporan hasil survai yang dilakukan mahasiswa angkatan tahun 2011/2012 (Semester III) yang memprogram Matakuliah Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Luar Sekolah (LBKLS). Salah satu tugas menempuh Matakuliah LBKLS adalah melakukan kegiatan survai yang meliputi survai pelaksanaan kegiatan dan program BK di sekolah. Kegiatan survai di sekolah dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan BK di sekolah, terutama dalam mengembangkan dan menyusun program BK meliputi: dasar pengembangan dan penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi program, analisis hasil evaluasi dan tindak-lanjut.

Kegiatan survai di sekolah dilakukan melalui kerja kelompok, tiap kelompok terdiri dari 3-5 mahasiswa. Dan dilaksanakan setelah mereka memperoleh pemahaman tentang kajian paradigma BK termasuk pemahaman tentang BK-Komprehensif, konsep dasar BK, tujuan BK, fungsi BK, asas-asas BK, model-model pengembangan dan penyusunan BK di sekolah seperti pola 17; pola 17+; IKMS; dan Kerangka Kerja Utuh (KKU), berlatih mengembangkan program BK di sekolah dan berlatih menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal (RPLBK) dan rencana pelaksanaan layanan konseling individual (RPLKI).

Setelah memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep dasar di atas, selanjutnya mahasiswa mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan survai dengan menyusun proposal survai. Tujuan utama, survai adalah untuk membandingkan antara perkembangan teori BK yang terjadi melalui kajian perkuliahan dengan praksis BK di sekolah. Secara khusus kegiatan survai bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang pelaksanaan program BK di sekolah yang meliputi dasar pengembangan dan penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi dan tindak-lanjut yang direncanakan guru BK di sekolah.

Berdasarkan informasi dan data-data tentang pelaksanaan kegiatan dan program BK di sekolah, selanjutnya disusun dalam bentuk laporan hasil survai. Laporan-laporan inilah yang dianalisis dalam penelitian ini. Laporan hasil survai mahasiswa dianggap telah memenuhi tingkat validitas, terutama validitas isi (hasil kajian), karena telah dipresentasikan di kelas (seminar kelas) dan mendapatkan tanggapan dari mahasiswa dan apresiasi dari dosen pengampu matakuliah LBKLS. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Langkah pertama, dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan laporan meliputi bab per/bab laporan beserta lampiran-lampiran yang seharusnya dilaporkan, (2) Langkah kedua, mengklasifikasikan dasar-dasar pengembangan dan penyusunan program

BK di sekolah yang ditunjukkan pada laporan yang ada. Selain dilakukan pengklasifikasian dasar-dasar pengembangan dan penyusunan program BK serta bukti-bukti lanjutan yang diperoleh berdasarkan dokumen tentang program BK yang ada di lampiran. Pengecekan terhadap dokumen program BK yang dibuat guru BK dan konselor ini penting, karena sekaligus untuk memenuhi syarat ketepatan data (validity), dan (3) Langkah ketiga, mendiskripsikan hasil analisis dokumentasi dan mengintepretasikan alasan penetapan dan pemilihan dasar-dasar pengembangan dan penyusunan program BK di sekolah.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data hasil kajian dan analisis laporan survai pelaksanaan program BK di sekolah sejumlah 22 laporan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis satuan pendidikan, jumlah satuan pendidikan, dasar pengembangan dan penyusunan program serta alasan pemilihan dan penetapan model atau pola pengembangan dan penyusunan program sebagaimana dapat diperiksa pada tabel 2 di bawah ini.

**Tabel: 2 Data Kajian dan Analisis Laporan Hasil Survai Pelaksanaan Program BK di Sekolah**

Lembaga Sekolah	Jumlah	Dasar Pengembangan dan Penyusunan Program	Deskripsi Alasan Pemilihan dan Penetapan Model/Pola
SMP	8	1. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		2. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		3. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		4. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		5. KKU	Program menunjukkan format KKU
		6. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		7. KKU	Program menunjukkan format KKU
		8. KKU	Program menunjukkan format KKU
MTs	2	1. Pola 17+	KKU belum dipahami dengan baik
		2. Pola 17+	KKU diterapkan baru langkah pertama, yaitu kegiatan asesmen
SMA	11	1. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		2. IKMS dan Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		3. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		4. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		5. Pola 17	Tidak mengenal KKU dengan baik
		6. Pola 17	Tidak mengenal KKU dengan baik
		7. Pola 17	Tidak mengenal KKU dengan baik
		8. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik

		9. Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		10 Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
		11 Pola 17+	Tidak mengenal KKU dengan baik
SMK	1	1. Pola 17	Tidak mengenal KKU dengan baik
Jumlah	22		

Berdasarkan tampilan data pada tabel 2, selanjutnya dasar-dasar pengembangan dan penyusunan program diklasifikasikan berdasarkan lembaga sekolah dan model/pola pengembangan dan penyusunan program seperti divisualisasikan pada tabel 3 sebagai berikut;

**Tabel 3: Klasifikasi (%) Satuan Pendidikan dan Model/Pola Pengembangan Program**

Lembaga Sekolah	Model/Pola Pengembangan dan Penyusunan Program			
	KKU	Pola 17	Pola 17+	IKMS
SMP	3	-	5	-
MTS	-	-	2	-
SMA	-	3	8	1*
SMK	-	1	-	-
Jumlah	3	4	15	1*
Prosentase	13,63%	18,18%	68,18%	4,54%

Dari tabel 3 di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam pengembangan dan penyusunan program BK di sekolah paling banyak (68,18%) mendasarkan pada pola 17+ berasal dari lima (62,5%) lembaga SMP; dua (100%) lembaga MTs dan delapan (72,72%) lembaga SMA. Sedangkan lembaga sekolah yang masih mendasarkan pada pola 17 sebanyak 4 lembaga (18,18%) berasal dari tiga (27,27%) lembaga SMA dan satu (100) lembaga SMK. Hanya ada tiga (37,5%) lembaga SMP yang telah mendasarkan pada KKU. Ditemukan satu lembaga yaitu SMA yang menggunakan software IKMS (unsur dan prinsip kerjanya sama dengan pola 17).

Berdasarkan bukti-bukti empirik di atas, dapat dijelaskan bahwa guru BK dan konselor sekolah dalam mengembangkan dan menyusun program BK di sekolah masih mendasarkan pada model dan pola yang selama ini mereka kenal dan biasa dilakukan. Sebanyak 19 lembaga sekolah (87,6%) masih mendasarkan pada pola 17 (18,18%) dan pola 17+ (68,18%). Pola 17 dikenal sejak tahun 1993 sampai dengan diberlakukan KTSP (2006). Ketika KTSP diberlakukan mengalami penambahan unsur yaitu dua jenis layanan mediasi dan advokasi dan satu kegiatan pendukung yaitu kegiatan kepastakaan. Meskipun seharusnya sejak diberlakukan KTSP mereka telah merespons dan menggunakan pola 17+. Akan tetapi, kenyataannya masih ada lembaga sekolah yang bertahan menggunakan cara lama yaitu pola 17 sebanyak= 4 lembaga (18,18%).

Lembaga sekolah yang paling banyak menggunakan pola 17 terjadi di SMA (3 lembaga/ 37,5%) dari delapan lembaga sekolah yang diteliti dan SMK (1 lembaga/100%). Dibandingkan dengan SMP, maka tidak satu pun lembaga SMP yang menggunakan pola 17, mereka sudah menggunakan pola 17+. Itu berarti guru BK di SMP lebih responsif dengan kurikulum KTSP 2006 dan SMP juga lebih responsif dan dapat mengikuti perkembangan model terbaru yaitu Model KKU dibandingkan dengan SMA dan SMK. Ini terbukti dari tiga lembaga (37,5%) yang dalam pengembangan dan penyusunan program BK telah mendasarkan pada model KKU.

Demikian halnya dengan alasan penggunaan model pengembangan dan penyusunan program BK sekolah sebanyak 3 (14,28%) lembaga sekolah yang menggunakan KKU karena telah memahami dan mampu melaksanakan program BK yang didasarkan pada KKU. Ditemui satu lembaga (SMA) mencoba mendasarkan pada langkah pertama yaitu kegiatan asesmen yang terdapat pada prosedur kerja KKU. Akan tetapi, langkah-langkah berikutnya kembali mengikuti prosedur kerja pola 17+. Hal ini dianggap mereka tidak memahami model KKU dengan baik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan seluruh proses penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bahwa guru BK dan konselor sekolah dalam mengembangkan dan menyusun program masih mendasarkan pada pola 17 dan 17+ (86,36%). Hanya sedikit (13, 63%) yang mendasarkan pada KKU. Itu berarti mereka tidak mengikuti perkembangan model terbaru yaitu KKU yang merupakan salah satu model BK-Komprehensif, (2) Alasan guru BK dan konselor sekolah menggunakan model/pola 17 dan 17+ karena mereka tidak memahami dengan baik konsepsi, prosedur dan implementasi model KKU. Selain itu, ditengarai mereka masih merasa 'nyaman' menggunakan model/pola pengembangan dan penyusunan program yang selama ini diterapkan.

Dari temuan penelitian ini menggambarkan bahwa tidak mudah guru BK dan konselor sekolah beralih menggunakan model yang baru. Ini mencerminkan betapa kukuh sikap guru BK dalam mempertahankan hal-hal yang dianggap telah mapan. Mereka juga lamban dalam mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan paradigma yang terjadi. Selain hal-hal tersebut, penyebab lambannya mereka merespons perkembangan dimungkinkan penyebabnya adalah tidak adanya sosialisasi yang intensif dari otoritas pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan mulai dari tingkat satuan pendidikan, sampai kepala dinas yang berurusan dengan pendidikan.

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan: (1) Bagi guru BK dan konselor sekolah, disarankan mau membuka diri (open mind) terhadap perkembangan yang terjadi, seperti memanfaatkan model terbaru (KKU) dalam pengembangan dan penyusunan program BK di sekolah. Oleh karena KKU saat ini dianggap sebagai salah satu implementasi dari

konsepsi BK-Komprehensif, (2) Bagi kepala sekolah, sebaiknya memberikan keleluasaan guru BK dan konselor sekolah dalam upaya mencoba menerapkan model-model yang baru, (3) Bagi peneliti, disarankan melakukan penelitian lanjutan terutama berkaitan dengan membandingkan beberapa model dan pola pengembangan dan penyusunan program BK yang paling efektif. Bila perlu, melakukan penelitian yang mampu melahirkan suatu model pengembangan dan penyusunan program BK di sekolah yang komprehensif dan efektif disesuaikan dengan kondisi sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ASCA (2004). *ASCA National Standards for Students*, New York: American School Counselor Assosiation
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (2004). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan BK*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur (2006). *Panduan Pengembangan Diri: Disampaikan dalam Workshop Pengembangan Kultur Sekolah*, Surabaya: Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur.
- Dirjen. PMPTK., (2007). *Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal*, Jakarta: Depdiknas
- Henderson, P. (2004). *The Theory Behind The ASCA National Model*, NY: The Idaho School Counseling Model: A Framework for Comprehensive Programs
- Kartadinata, S. (2011). *Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling Sebagai Upaya Pedagogis*, Bandung: UPI Press
- Rahman, A.M.A. (2012). "A Guidance and Counseling Model Practiced with in Malaysian School", Yogyakarta: ISGC Article, Sept. 8-9, 2012
- Sudrajat, A. (2008). "Rekonsetualisasi BK di Sekolah": Artikel, diakses Januari 2008.
- Yusuf, S. (2011). "Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah" dalam Supriatna, M. (Ed), Jakarta: Rajawali Pers